



MEMBANGKITKAN KEMBALI NILAI-NILAI PANCASILA DI BERBAGAI JENJANG SEKOLAH

Revitalizing Pancasila Values Across Various Levels of Education

Haryanto

Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI

haryantopasca65@gmail.com

ABSTRAK: Perkembangan teknologi dan arus globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk tergerusnya nilai-nilai luhur Pancasila di kalangan generasi muda. Kemudahan akses informasi tanpa batas wilayah negara tidak hanya memberikan manfaat dalam bidang pengetahuan, tetapi juga menghadirkan tantangan serius dalam mempertahankan ideologi dan karakter kebangsaan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi membangkitkan kembali nilai-nilai Pancasila di berbagai jenjang pendidikan sebagai upaya memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka terhadap dokumen kebijakan, literatur akademik, dan regulasi terkait pendidikan Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila disebabkan oleh berkurangnya porsi pembelajaran ideologi Pancasila secara terstruktur pascareformasi. Penerapan kembali mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran wajib, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, menjadi langkah strategis dalam memperkuat pendidikan karakter. Artikel ini menegaskan bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan secara efektif melalui pembelajaran berjenjang, pembelajaran berbasis proyek, kegiatan ekstrakurikuler, budaya sekolah, serta keteladanan pendidik. Dengan penguatan peran dunia pendidikan dalam mewariskan nilai-nilai Pancasila, diharapkan terbentuk generasi muda yang berkarakter, berkepribadian nasional, dan mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas kebangsaan.

Kata kunci: Pancasila, pendidikan karakter, ideologi negara, globalisasi, dunia pendidikan.

ABSTRACT: *Technological advancement and the dynamics of globalization have significantly influenced national life, including the erosion of Pancasila's noble values among the younger generation. The unrestricted flow of information across national borders not only provides broad access to knowledge but also presents serious challenges in maintaining national ideology and character. This article aims to examine the urgency of revitalizing Pancasila values across various levels of education as an effort to strengthen Indonesia's national identity. This study employs a descriptive qualitative approach through a literature review of policy documents, academic sources, and regulations related to Pancasila education. The findings indicate that the weakening internalization of Pancasila values is largely attributed to the reduced and less structured instruction of Pancasila ideology in the post-reform era. The reinstatement of Pancasila as a compulsory subject, as stipulated in Government Regulation No. 4 of 2022, represents a strategic step toward reinforcing character education. The article further emphasizes that the effective inculcation of Pancasila values can be achieved through tiered learning, project-based learning, extracurricular activities, the development of positive school culture, and exemplary conduct by educators. Strengthening the role of education in transmitting Pancasila values is expected to foster a generation with strong character, national identity, and the capacity to face global challenges without losing its cultural and ideological foundations..*

Keywords: *Pancasila, character education, state ideology, globalization, education system.*

LATAR BELAKANG

Menanamkan sebuah ideologi bagi suatu negara pada generasi penerusnya adalah sebuah keharusan agar bangsa tersebut dapat bertahan dan tidak terlindas oleh perkembangan jaman. Kita sadari perkembangan teknologi mampu membuka batas suatu negara sehingga yang tertinggal hanya batas wilayah suatu negara ini menandakan dengan kemajuan teknologi segala informasi dapat dengan mudah diperoleh oleh siapapun tanpa terkecuali.

Dalam era globalisasi ini kemajuan teknologi dapat membawa dampak positif, seperti kemajuan teknologi mampu memberi akses kepada siapapun terhadap ilmu pengetahuan, disamping dapat memberikan kemudahan mendapat ilmu pengetahuan ternyata disisi lain melahirkan tantangan bagi sebuah negara dalam mempertahankan nilai-nilai luhur yang selama ini berkembang dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita sadari bahwa kemajuan teknologi ini sudah mampu mengikis nilai-nilai yang ada pada dasar negara yaitu Pancasila, sungguh banyak nilai-nilai yang ditanamkan dalam butir-butir Pancasila mulai memudar, bias kita lihat sehari-hari bagaimana nilai-nilai Pancasila itu tidak lagi menjadi pedoman bagi generasi selanjutnya.

Masyarakat pada umumnya dan para siswa cenderung beranggapan bahwa Pancasila hanya sebagai sebuah Ideologi negara tanpa mau memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila sepertinya kita perlu kembali mengali butir-butir Pancasila yang sepertinya sudah tidak terimplementasi dengan baik bila kita coba mengali kembali butir-butir Pancasila tentu kita harus mencoba melihat butir-butir Pancasila sebanyak 45 butir yang selama ini mulai memudar untuk dibahas dalam dunia pendidikan.

Sebagai sebuah refleksi kita terhadap butir-butir Pancasila mungkin dapat disampaikan di sini 45 butir Pancasila diantaranya

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

- 1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - 3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 - 6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
 - 7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
- 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
 - 3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
 - 4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
 - 5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

- 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
 - 7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 - 8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - 9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
 - 10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
3. Persatuan Indonesia
- 1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - 2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
 - 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
 - 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 - 5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 - 6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
 - 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- 1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
 - 2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 - 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 - 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
 - 6) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 - 7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - 8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 - 9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
 - 10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 - 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
 - 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - 4) Menghormati hak orang lain.
 - 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
 - 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
 - 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
 - 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
 - 9) Suka bekerja keras.
 - 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
 - 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Dunia pendidikan harus mampu menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila ini secara baik kepada siswa secara berjenjang maka tentu keberlanjutan bangsa Indonesia ini akan dapat tetap dipertahankan.

Dunia pendidikan dapat mengambil peran yang penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dengan butir-butir Pancasila yang sudah tergambar secara baik dengan 45 butir Pancasila.

Semenjak reformasi pada tahun 1998 mata pelajaran Pancasila bukan lagi sebuah mata pelajaran tersendiri tetapi menjadi bagian dari pendidikan kewarganegaraan tentu keadaan ini tidak memungkinkan menanamkan ideologi Pancasila secara terukur.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas PP Nomor 57 tahun 2021 tanggal 12 Januari 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, mata pelajaran Pancasila kembali menjadi pelajaran wajib disekolah.

Pancasila memiliki nilai-nilai yang berkaitan erat dengan karakter, yang terlihat dari nilai-nilai Pancasila yang merupakan jati diri masyarakat Indonesia yang memiliki ciri khas dan kekhasan pribadi bangsa, Kepribadian bangsa dari nilai-nilai luhur Pancasila bangsa Indonesia perlu dilestarikan dengan mewariskan karakter Pancasila kepada generasi muda sebagai pedoman hidup. Tempat untuk mewariskan karakter tersebut salah satunya adalah melalui dunia pendidikan (Nurizka, R. & Rahim, A. 2020)

Pendidikan Pancasila sebagai sebuah penanaman ideologi negara memiliki peran penting dalam menentukan arah dan landasan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia. Dapat kita katakan bahwa Pancasila merupakan sudut pandang bangsa Indonesia dalam melihat dirinya sendiri, sehingga Pancasila dapat dijadikan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

METODA

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis secara mendalam urgensi revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam

sistem pendidikan Indonesia di tengah tantangan globalisasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, konsep, serta konstruksi nilai ideologis Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter bangsa, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell, 2014). Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur akademik berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen kebijakan publik, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Standar Nasional Pendidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan telaah kritis terhadap sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila, pendidikan karakter, dan dampak globalisasi terhadap nilai kebangsaan (Zed, 2018). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu menelaah dan menafsirkan substansi teks secara sistematis untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antar konsep yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran strategis pendidikan sebagai sarana pewarisan nilai-nilai Pancasila secara berjenjang dan berkelanjutan guna memperkuat jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

PEMBAHASAN

Pancasila merupakan dasar negara dan merupakan ideologi bangsa Indonesia yang selama ini dijadikan sebagai pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia berbangsa dan bernegara pemahaman tentang ideologi Pancasila ini dapat kita mulai bagai mana pemahaman Pancasila dapat dipahami secara baik oleh masyarakat, bila kita memperhatikan butir-butir Pancasila sebanyak 45 dimana setiap butir merupakan penjabaran bagaimana kita dapat menjalani kehidupan berbangsa ini.

Bila masyarakat Indonesia dapat memahami dengan baik butir-butir Pancasila maka kita dapat berharap bahwa dinamisasi berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik. Untuk dapat mengembalikan Pancasila sebagai sudut pandang hidup bangsa Indonesia tidak ada jalan lain pemerintah harus dapat membuat perencanaan yang baik dalam pembelajaran Pancasila dari berbagai kalangan. Pembelajaran Pancasila dapat dimulai dari usia dini dan itu bisa kita mulai dari sekolah-sekolah beberapa cara yang mungkin dapat dilakukan dalam menanamkan ideologi Pancasila adalah :

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn):

Pembelajaran Pancasila sebaiknya dimulai sejak usia dini karena pada tahap ini peserta didik berada dalam fase pembentukan karakter, sikap, dan nilai dasar kehidupan sosial. Sekolah memiliki peran strategis sebagai ruang institusional untuk mentransmisikan nilai-nilai ideologi negara secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemisahan antara mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi penting agar proses internalisasi nilai ideologis dan pembentukan kesadaran kewarganegaraan dapat berlangsung secara lebih fokus dan mendalam. Pendidikan Pancasila diarahkan pada penanaman nilai moral, etika, dan karakter sebagaimana tercermin dalam butir-butir Pancasila, sementara PPKn menekankan aspek pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan, seperti hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, konstitusi, dan partisipasi sosial-politik (Winarno, 2013).

Dalam praktik pembelajaran, Pendidikan Pancasila dapat difokuskan pada penghayatan nilai melalui pengalaman langsung dan pembiasaan sikap. Sebagai contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditanamkan melalui kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar, serta sikap saling menghormati antar siswa yang berbeda agama. Nilai Kemanusiaan

yang Adil dan Beradab dapat diwujudkan melalui kegiatan berbagi, seperti menggalang bantuan bagi teman yang sakit atau korban bencana, serta membiasakan siswa untuk tidak melakukan perundungan (bullying). Nilai Persatuan Indonesia dapat diimplementasikan melalui kerja kelompok lintas latar belakang sosial dan budaya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik di lingkungan sekolah, serta kegiatan upacara bendera yang dimaknai secara reflektif, bukan sekadar rutinitas.

Sementara itu, mata pelajaran PPKn berfungsi untuk membekali peserta didik dengan pemahaman praktis tentang peran mereka sebagai warga negara. Contoh penerapan PPKn dalam kehidupan sehari-hari antara lain membiasakan musyawarah dalam pemilihan ketua kelas sebagai wujud demokrasi, menaati tata tertib sekolah sebagai latihan kesadaran hukum, serta berpartisipasi dalam kegiatan OSIS sebagai bentuk pembelajaran partisipasi publik. Pemisahan fokus ini memungkinkan siswa tidak hanya mengetahui Pancasila sebagai konsep normatif, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilainya sebagai pedoman bersikap dan bertindak dalam kehidupan sosial (Nurizka & Rahim, 2020).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Pancasila yang menekankan aspek nilai dan karakter secara kontekstual lebih efektif dalam membentuk sikap kebangsaan peserta didik. Penelitian Nurizka dan Rahim (2020) menegaskan bahwa pendidikan Pancasila memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan karakter nasionalisme dan moral generasi muda apabila diajarkan secara terstruktur dan aplikatif. Hal ini sejalan dengan pandangan Kaelan (2016) yang menyatakan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi negara, tetapi juga sistem nilai yang harus dihidupi dalam praktik sosial sehari-hari. Dengan demikian, pemisahan Pendidikan Pancasila dan PPKn bukan sekadar kebijakan kurikuler, melainkan strategi pedagogis untuk memastikan nilai ideologis dan kesadaran

kewarganegaraan tumbuh secara seimbang dan berkelanjutan.

2. Pembelajaran Berbasis Proyek:

Pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning/PjBL*) merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses belajar melalui keterlibatan langsung pada proyek-proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sosial. Dalam konteks pendidikan Pancasila, PjBL menjadi ruang strategis untuk mengimplementasikan nilai-nilai ideologi Pancasila secara kontekstual, aplikatif, dan bermakna. Melalui proyek, siswa tidak hanya memahami Pancasila sebagai konsep normatif, tetapi juga menghayati dan mempraktikkan nilai-nilainya dalam tindakan nyata, sehingga proses internalisasi nilai berlangsung lebih mendalam (Kokotsaki, Menzies, & Wiggins, 2016).

Pembelajaran berbasis proyek memungkinkan integrasi kelima sila Pancasila dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Sebagai contoh konkret, proyek bertema “Sekolah Ramah dan Toleran” dapat digunakan untuk menanamkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam proyek ini, siswa dapat melakukan observasi terhadap praktik toleransi di lingkungan sekolah, mewawancarai teman yang berbeda latar belakang agama atau budaya, kemudian menyusun kampanye poster atau video pendek tentang pentingnya saling menghormati. Aktivitas tersebut melatih empati, penghargaan terhadap perbedaan, serta sikap anti-diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai Persatuan Indonesia dapat diimplementasikan melalui proyek kolaboratif lintas kelompok, seperti proyek “Peta Budaya Nusantara”, di mana siswa bekerja dalam tim untuk meneliti budaya daerah tertentu, kemudian mempresentasikannya dalam bentuk pameran kelas. Melalui kerja kelompok ini, siswa belajar bekerja sama, menghargai perbedaan, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Sementara

itu, nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dapat ditanamkan melalui proyek musyawarah kelas, misalnya merancang tata tertib kelas atau memilih tema kegiatan sekolah melalui diskusi dan pengambilan keputusan bersama. Proses ini melatih siswa untuk menyampaikan pendapat secara santun, menghargai pandangan orang lain, dan menerima keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab.

Adapun nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat diwujudkan melalui proyek sosial, seperti kegiatan bakti sosial, pengelolaan bank sampah sekolah, atau program berbagi dengan masyarakat sekitar. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa belajar tentang keadilan, kepedulian sosial, kerja keras, serta pentingnya berkontribusi bagi kesejahteraan bersama. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek yang berorientasi pada nilai sosial dan kewarganegaraan mampu meningkatkan kepedulian sosial, tanggung jawab, serta karakter prososial peserta didik (Sari, Sumarmi, & Astina, 2016).

Sejumlah kajian akademik menegaskan bahwa PjBL efektif digunakan dalam pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan karena memberikan pengalaman belajar yang autentik dan reflektif. Kokotsaki et al. (2016) menyatakan bahwa PjBL mendorong pengembangan nilai, sikap, dan keterampilan abad ke-21 melalui pembelajaran kolaboratif dan berbasis masalah nyata. Dalam konteks Indonesia, penelitian Sari et al. (2016) menunjukkan bahwa PjBL dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila apabila dirancang secara sistematis dan kontekstual. Dengan demikian, pembelajaran berbasis proyek tidak hanya berfungsi sebagai strategi pedagogis, tetapi juga sebagai medium ideologis untuk membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

3. Pembelajaran disampaikan Diskusi:

Pembelajaran melalui diskusi merupakan strategi pedagogis yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila karena mendorong peserta didik berpikir kritis, reflektif, dan dialogis dalam menyikapi berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Diskusi kelas, forum debat terarah, maupun seminar mini tentang isu-isu aktual yang berkaitan dengan Pancasila memberi ruang bagi siswa untuk mengaitkan nilai ideologi negara dengan realitas kehidupan sehari-hari. Melalui proses ini, siswa tidak hanya memahami Pancasila sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai pedoman etis dalam menyikapi perbedaan pendapat dan konflik sosial secara demokratis (Winarno, 2013).

Dalam praktik pembelajaran, diskusi dapat dirancang dengan mengangkat isu-isu kontekstual, seperti toleransi beragama, penggunaan media sosial secara bertanggung jawab, perundungan di sekolah, kesetaraan gender, atau kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh konkret, guru dapat mengadakan diskusi kelas bertema "Apakah ujaran kebencian di media sosial bertentangan dengan nilai Pancasila?". Dalam diskusi ini, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk menganalisis isu berdasarkan sila-sila Pancasila, kemudian mempresentasikan hasil pemikirannya. Aktivitas tersebut melatih kemampuan berpikir kritis, menyampaikan argumen secara logis, serta menghargai pandangan orang lain, yang mencerminkan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Selain diskusi kelas, seminar mini juga dapat dijadikan wahana pembelajaran Pancasila yang lebih luas. Misalnya, sekolah dapat menyelenggarakan seminar mini bertema "Pancasila dan Tantangan Generasi Digital" dengan melibatkan siswa sebagai pemantik diskusi, moderator, dan notulis. Dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman ini mengajarkan siswa untuk berbicara dengan sopan, mendengarkan secara

aktif, serta membangun kesepakatan bersama melalui musyawarah. Nilai Persatuan Indonesia juga tercermin ketika siswa dari latar belakang yang beragam dapat berdiskusi secara inklusif tanpa memaksakan kehendak. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa metode diskusi efektif dalam mengembangkan sikap demokratis dan karakter kewarganegaraan peserta didik. Penelitian oleh Suyato dan Widodo (2016) menemukan bahwa pembelajaran PPKn berbasis diskusi mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap toleran siswa. Sementara itu, studi oleh Setyowati dan Winarno (2020) menegaskan bahwa diskusi isu-isu kewarganegaraan yang kontekstual berkontribusi pada penguatan nilai-nilai Pancasila dan sikap partisipatif peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran melalui diskusi tidak hanya berfungsi sebagai metode transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Upacara Bendera

Upacara bendera merupakan salah satu bentuk praktik pendidikan kewarganegaraan yang bersifat simbolik, ritualistik, sekaligus edukatif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme kepada peserta didik. Pelaksanaan upacara bendera secara rutin setiap hari Senin dan pada hari-hari besar nasional tidak seharusnya dipahami hanya sebagai kewajiban administratif atau kegiatan seremonial semata, melainkan sebagai media pembentukan karakter, disiplin, dan kesadaran kebangsaan. Melalui upacara bendera, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin dalam doa bersama, nilai Persatuan Indonesia tampak dalam kebersamaan seluruh warga sekolah, serta nilai Kerakyatan dan Keadilan Sosial diwujudkan melalui penghormatan terhadap simbol negara dan penguatan rasa tanggung jawab sebagai warga negara (Somantri, 2011). Agar upacara bendera memiliki makna yang mendalam, pelaksanaannya perlu disertai dengan internalisasi nilai,

misalnya melalui amanat pembina upacara yang kontekstual dan reflektif. Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika pembina upacara mengaitkan tema amanat dengan peristiwa aktual, seperti pentingnya toleransi di tengah keberagaman, etika bermedia sosial, atau kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Dengan demikian, siswa tidak hanya berdiri mengikuti rangkaian upacara, tetapi juga memahami pesan moral dan nilai Pancasila yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, seperti bersikap disiplin datang tepat waktu, menghormati guru dan teman, serta menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah.

Selain itu, keterlibatan aktif siswa dalam petugas upacara, seperti Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), pembaca teks Pancasila, dan pembaca UUD 1945, juga menjadi sarana pembelajaran karakter. Dalam praktiknya, siswa belajar tentang tanggung jawab, kerja sama, kepemimpinan, dan pengorbanan demi kepentingan bersama. Nilai Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan tercermin ketika seluruh petugas upacara bekerja secara kolektif dan saling menghargai peran masing-masing. Penelitian oleh Hidayat dan Widodo (2018) menunjukkan bahwa keterlibatan siswa dalam kegiatan upacara bendera berkontribusi positif terhadap pembentukan sikap nasionalisme dan disiplin peserta didik. Namun demikian, kebijakan pelaksanaan upacara bendera juga perlu mempertimbangkan kondisi sarana dan prasarana sekolah. Tidak semua sekolah, terutama di daerah terpencil atau tertinggal, memiliki lapangan upacara yang memadai. Dalam kondisi demikian, pelaksanaan upacara dapat disesuaikan secara fleksibel tanpa menghilangkan esensi nilai yang ingin ditanamkan. Contohnya, upacara dapat dilakukan di halaman sekolah yang terbatas, di dalam aula, atau melalui upacara kelas secara bergiliran dengan tetap menjaga kekhidmatan dan tata upacara. Hal ini

sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan nilai Pancasila lebih menekankan pada makna dan penghayatan, bukan semata-mata pada bentuk fisik pelaksanaannya (Komalasari, 2017).

Sejumlah kajian menegaskan bahwa upacara bendera yang dirancang secara bermakna dapat menjadi instrumen efektif dalam pendidikan karakter dan penguatan ideologi Pancasila. Komalasari (2017) menyatakan bahwa aktivitas sekolah yang bersifat rutin namun reflektif, seperti upacara bendera, mampu membentuk karakter kewarganegaraan apabila dikaitkan dengan nilai dan pengalaman nyata peserta didik. Oleh karena itu, upacara bendera perlu terus dipertahankan dan dikembangkan sebagai bagian integral dari ekosistem pendidikan Pancasila, dengan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi sekolah namun tetap berorientasi pada pembentukan karakter dan kesadaran kebangsaan.

5. Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan wahana strategis dalam pendidikan karakter karena memberikan ruang pembelajaran di luar kelas yang bersifat pengalaman langsung (*experiential learning*). Dalam konteks pendidikan Pancasila, kegiatan ekstrakurikuler memungkinkan peserta didik menginternalisasi nilai-nilai Pancasila secara nyata melalui praktik sosial, kepemimpinan, kerja sama, dan pengabdian. Di bawah arahan pembina, kegiatan ekstrakurikuler dapat diarahkan secara sistematis untuk menumbuhkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, sehingga Pancasila tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi dihidupi dalam tindakan sehari-hari (Komalasari, 2017). Organisasi siswa seperti OSIS, Pramuka, dan Paskibra merupakan contoh konkret kegiatan ekstrakurikuler yang sarat dengan nilai Pancasila. Melalui OSIS, siswa belajar nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, misalnya ketika menyusun program kerja melalui musyawarah, melaksanakan pemilihan ketua OSIS secara demokratis, serta mempertanggungjawabkan kegiatan kepada warga sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini tercermin ketika siswa terbiasa menyampaikan pendapat dengan santun, menerima keputusan bersama, dan mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi.

Kegiatan Pramuka, sebagai ekstrakurikuler wajib di banyak sekolah, sangat relevan dengan penanaman nilai Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial. Contoh konkret dapat dilihat melalui kegiatan kerja bakti, perkemahan, bakti sosial, dan latihan kepemimpinan, yang menumbuhkan sikap gotong royong, kemandirian, disiplin, serta kepedulian terhadap sesama. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab diwujudkan ketika siswa dilatih untuk saling menolong, menghormati perbedaan, dan berempati terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar. Penelitian oleh Suryani dan Aman (2018) menunjukkan bahwa keikutsertaan siswa dalam kegiatan Pramuka berpengaruh positif terhadap pembentukan karakter sosial dan nasionalisme peserta didik.

Ekstrakurikuler berbasis keagamaan juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Kegiatan seperti Rohani Islam (Rohis), Rohani Kristen, dan kegiatan keagamaan lainnya mengajarkan siswa untuk menjalankan ajaran agama secara bertanggung jawab, sekaligus menumbuhkan sikap toleransi antarumat beragama. Contoh konkret dalam kehidupan sekolah adalah pelaksanaan kegiatan doa bersama sesuai agama masing-masing, peringatan hari besar keagamaan, serta aksi sosial lintas organisasi keagamaan. Aktivitas ini memperkuat kesadaran bahwa keberagaman merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia yang harus dijaga (Nurizka & Rahim, 2020).

Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada keterampilan dan

kepemimpinan, seperti klub kewirausahaan, seni, olahraga, dan palang merah remaja (PMR), juga berkontribusi pada penguatan nilai Keadilan Sosial dan Kemanusiaan. Misalnya, melalui PMR siswa belajar menolong orang lain tanpa membedakan latar belakang, sementara kegiatan kewirausahaan melatih kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Penelitian Komalasari (2017) menegaskan bahwa pembelajaran karakter yang terintegrasi dalam aktivitas non akademik sekolah lebih efektif karena melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara simultan.

Dengan demikian, kegiatan ekstrakurikuler tidak boleh dipandang sebagai pelengkap semata, melainkan sebagai bagian integral dari ekosistem pendidikan Pancasila. Dukungan kebijakan sekolah, kompetensi pembina, serta keterlibatan aktif peserta didik menjadi kunci agar kegiatan ekstrakurikuler benar-benar mampu menjadi media pembiasaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari siswa.

6. Peringatan Hari Besar Nasional

Peringatan hari besar nasional merupakan salah satu strategi kontekstual yang efektif dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sekaligus menguatkan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Kegiatan ini memiliki nilai edukatif karena menghubungkan peristiwa historis, simbol kebangsaan, dan identitas nasional dengan pengalaman belajar peserta didik secara langsung. Melalui peringatan hari besar nasional, sekolah tidak hanya menyampaikan pengetahuan sejarah, tetapi juga menumbuhkan rasa nasionalisme, persatuan, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai inti dari nilai-nilai Pancasila (Sutono, 2021). Dalam konteks P5, peringatan hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan 17 Agustus, Hari Pahlawan, Hari Sumpah Pemuda, dan Hari Lahir Pancasila dapat dikemas dalam bentuk kegiatan kolaboratif yang

melibatkan seluruh warga sekolah. Misalnya, lomba-lomba tradisional, pentas seni budaya daerah, pameran sejarah, hingga proyek kelas tematik yang mengangkat nilai perjuangan, persatuan, dan gotong royong. Melalui kegiatan tersebut, siswa belajar dimensi bergotong royong, berkebhinnekaan global, dan bernalar kritis sebagaimana ditekankan dalam Profil Pelajar Pancasila (Kemendikbudristek, 2022). Contoh konkret penerapan nilai Persatuan Indonesia dapat dilihat pada kegiatan pentas seni dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda, di mana siswa dari berbagai latar belakang budaya menampilkan tarian, lagu, atau pakaian adat daerah yang berbeda. Aktivitas ini mendorong siswa untuk saling menghargai perbedaan dan memahami bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman ini tercermin ketika siswa menjadi lebih terbuka, tidak diskriminatif, dan mampu bekerja sama dengan teman yang memiliki latar belakang berbeda. Penelitian oleh Nurhadi dan Hidayat (2020) menunjukkan bahwa kegiatan berbasis budaya dalam peringatan nasional berkontribusi signifikan terhadap sikap toleransi dan kohesi sosial peserta didik. Selain itu, pameran sejarah atau lomba poster bertema pahlawan nasional dapat menanamkan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Kerakyatan. Melalui kegiatan ini, siswa diajak untuk memahami perjuangan tokoh-tokoh bangsa, nilai pengorbanan, keadilan, dan semangat memperjuangkan kepentingan rakyat. Misalnya, siswa diminta membuat poster tentang tokoh pahlawan lokal dan mempresentasikannya di depan kelas atau pameran sekolah. Aktivitas ini melatih kemampuan berpikir kritis, komunikasi, serta empati terhadap perjuangan masa lalu yang relevan dengan tantangan kebangsaan saat ini. Peringatan hari besar nasional juga dapat menjadi sarana pembelajaran demokratis dan partisipatif. Pelibatan siswa dalam perencanaan kegiatan—mulai dari pembentukan panitia, pembagian tugas, hingga evaluasi—

mencerminkan praktik nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dalam praktik sehari-hari, hal ini melatih siswa untuk bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain, serta bertanggung jawab atas keputusan bersama. Hal ini sejalan dengan temuan Winarno (2018) yang menegaskan bahwa kegiatan partisipatif di sekolah berperan penting dalam pembentukan karakter kewarganegaraan siswa.

Dengan demikian, peringatan hari besar nasional tidak seharusnya dipandang sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan sebagai media strategis untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dan mengimplementasikan P5 secara kontekstual. Ketika dirancang secara kreatif, partisipatif, dan reflektif, kegiatan ini mampu menciptakan saling pengertian antar siswa, memperkuat identitas kebangsaan, serta membentuk karakter pelajar yang beriman, berkebhinnekaan, gotong royong, dan cinta tanah air.

7. Kegiatan Sosial

Kegiatan sosial merupakan media pembelajaran kontekstual yang sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia. Melalui kegiatan sosial seperti bakti sosial, donor darah, dan kerja bakti, peserta didik tidak hanya memahami Pancasila sebagai konsep normatif, tetapi juga menghayatinya sebagai pedoman moral yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) ini memungkinkan siswa mengembangkan empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial secara langsung dalam kehidupan sehari-hari (Kolb, 2015).

Dalam konteks pendidikan sekolah, kegiatan bakti sosial—misalnya penggalangan dana dan bantuan bagi korban bencana alam atau masyarakat kurang mampu—dapat dirancang sebagai bagian dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Kegiatan ini melibatkan siswa dalam proses

perencanaan, pengorganisasian, hingga pelaksanaan, sehingga menumbuhkan nilai gotong royong, kepedulian sosial, dan kemandirian. Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika siswa terbiasa berbagi dengan teman yang membutuhkan, membantu warga sekitar sekolah, atau menjaga kebersihan lingkungan secara sukarela tanpa paksaan. Penelitian oleh Sari dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan siswa dalam kegiatan sosial sekolah berpengaruh positif terhadap peningkatan sikap empati dan perilaku prososial.

Kegiatan donor darah, khususnya di tingkat SMA atau perguruan tinggi, juga mencerminkan implementasi nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar tentang pentingnya kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga menyadari perannya sebagai bagian dari masyarakat yang saling membutuhkan. Dalam praktik keseharian, kesadaran ini tercermin dalam sikap peduli terhadap keselamatan orang lain, seperti membantu teman yang sakit atau aktif dalam kegiatan Palang Merah Remaja (PMR). Studi oleh Widiastuti dan Pranowo (2019) menegaskan bahwa kegiatan donor darah di lingkungan pendidikan mampu meningkatkan kesadaran sosial dan rasa tanggung jawab kemanusiaan peserta didik.

Sementara itu, kerja bakti di lingkungan sekolah dan masyarakat menjadi sarana konkret untuk menanamkan nilai gotong royong dan keadilan sosial. Kegiatan membersihkan lingkungan sekolah, memperbaiki fasilitas umum, atau membantu warga sekitar menciptakan kebiasaan bekerja bersama tanpa memandang latar belakang sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini tercermin ketika siswa terbiasa bekerja sama dalam kelompok, saling membantu menyelesaikan tugas, dan tidak bersikap individualistis. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Wuryandani et al. (2018) yang menyatakan bahwa kegiatan kerja bakti

di sekolah efektif dalam membentuk karakter gotong royong dan kepedulian sosial siswa.

Dengan demikian, kegiatan sosial bukan sekadar aktivitas tambahan, melainkan bagian integral dari pendidikan karakter berbasis Pancasila. Melalui keterlibatan aktif siswa dan guru dalam kegiatan sosial yang terencana dan reflektif, sekolah dapat menciptakan ekosistem pembelajaran yang menumbuhkan nilai kemanusiaan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan. Kegiatan sosial yang dilaksanakan secara konsisten akan membentuk kebiasaan baik yang melekat dalam perilaku siswa, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

8. Menjadi Teladan

Guru dan staf sekolah memiliki peran strategis sebagai teladan utama (*role model*) dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Penanaman nilai tidak cukup dilakukan melalui transfer pengetahuan kognitif, tetapi harus diwujudkan melalui keteladanan sikap dan perilaku nyata. Dalam perspektif pendidikan karakter, keteladanan merupakan metode paling efektif karena peserta didik cenderung meniru nilai, sikap, dan perilaku figur yang dianggap memiliki otoritas moral dan sosial, seperti guru dan tenaga kependidikan (Lickona, 2013).

Sebagai pendidik, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar yang menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga sebagai pembimbing moral yang merepresentasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin ketika guru menunjukkan sikap toleran terhadap perbedaan agama dan keyakinan, misalnya dengan menghormati waktu ibadah siswa dan tidak bersikap diskriminatif. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tampak dalam cara guru memperlakukan seluruh siswa secara adil, tidak merendahkan, serta menghindari kekerasan verbal maupun nonverbal di kelas.

Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat ketika guru bersikap jujur dalam penilaian, disiplin hadir tepat waktu, serta bertanggung jawab terhadap tugasnya. Sikap ini secara tidak langsung mengajarkan nilai keadilan, integritas, dan tanggung jawab kepada siswa. Di lingkungan sekolah, staf tata usaha yang melayani siswa dengan ramah dan adil juga menjadi contoh nyata penerapan nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Penelitian oleh Wuryandani dan Prasetyo (2019) menunjukkan bahwa keteladanan guru memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab peserta didik.

Dalam konteks nilai Persatuan Indonesia, guru dapat menjadi teladan dengan menumbuhkan semangat kebersamaan, menghindari ujaran yang memecah belah, serta mendorong kerja sama lintas latar belakang sosial dan budaya. Misalnya, guru tidak membedakan siswa berdasarkan status ekonomi, suku, atau prestasi akademik, serta aktif menciptakan suasana kelas yang inklusif. Sikap ini akan membentuk kesadaran siswa bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa.

Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan tercermin ketika guru membiasakan pengambilan keputusan melalui musyawarah, seperti melibatkan siswa dalam penyusunan aturan kelas atau pemilihan ketua kelas secara demokratis. Dalam praktik sehari-hari, guru yang mau mendengar pendapat siswa dan menghargai perbedaan pandangan telah menanamkan nilai demokrasi secara langsung. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Suyanto dan Widodo (2020) yang menegaskan bahwa praktik demokratis di kelas mampu meningkatkan kesadaran kewarganegaraan siswa.

Sementara itu, nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat diteladankan melalui sikap empati dan kepedulian guru terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar maupun masalah ekonomi. Contoh konkret

adalah guru yang memberikan pendampingan tambahan bagi siswa tertinggal tanpa memungut biaya, atau menginisiasi bantuan sosial internal sekolah. Keteladanan seperti ini membentuk kepekaan sosial siswa dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, keteladanan guru dan staf sekolah merupakan fondasi utama dalam pendidikan Pancasila. Ketika nilai-nilai Pancasila dihidupi dan dipraktikkan secara konsisten oleh pendidik, peserta didik tidak hanya memahami Pancasila sebagai konsep normatif, tetapi juga menjadikannya sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, penguatan kompetensi moral dan kepribadian guru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun karakter Pancasila di lingkungan pendidikan.

9. Menerapkan Budaya Sekolah

Budaya sekolah merupakan seperangkat nilai, norma, kebiasaan, dan tradisi yang berkembang serta dipraktikkan secara konsisten oleh seluruh warga sekolah. Budaya sekolah yang positif berperan penting sebagai media internalisasi nilai-nilai Pancasila karena membentuk iklim pendidikan yang kondusif bagi penguatan karakter peserta didik. Dalam konteks pendidikan karakter, budaya sekolah tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi sebagai proses pembiasaan nilai yang dilakukan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari (Kemendikbud, 2017).

Penerapan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) merupakan contoh konkret budaya sekolah yang mencerminkan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Melalui pembiasaan 5S, siswa dilatih untuk menghormati sesama, membangun komunikasi yang beretika, serta mengembangkan empati sosial. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah kebiasaan siswa memberi salam kepada guru dan teman ketika bertemu, menyapa dengan ramah petugas kebersihan, serta berbicara dengan bahasa yang santun di lingkungan sekolah. Penelitian oleh Sari dan Wahyudi (2020) menunjukkan

bahwa pembiasaan 5S di sekolah dasar berkontribusi signifikan terhadap peningkatan sikap sopan santun dan empati siswa.

Selain itu, budaya antrai mencerminkan nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan. Budaya ini mengajarkan siswa untuk menghargai hak orang lain, bersikap adil, dan menahan diri demi kepentingan bersama. Contoh penerapannya terlihat ketika siswa mengantrai secara tertib saat memasuki kelas, membeli makanan di kantin, atau menggunakan fasilitas sekolah. Pembiasaan antrai secara konsisten membantu siswa memahami bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan harus dihormati. Hal ini sejalan dengan temuan Wibowo (2016) yang menegaskan bahwa pembiasaan perilaku tertib dan adil di sekolah efektif dalam membentuk karakter sosial peserta didik.

Selanjutnya, budaya disiplin menjadi fondasi penting dalam membangun karakter tanggung jawab dan integritas yang sejalan dengan nilai Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial. Budaya disiplin tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap tata tertib, tetapi juga mencakup kesadaran internal untuk menjalankan kewajiban tanpa paksaan. Contoh konkret budaya disiplin adalah datang ke sekolah tepat waktu, mengenakan seragam sesuai ketentuan, menyelesaikan tugas sesuai jadwal, serta menjaga kebersihan kelas. Sekolah yang berhasil menanamkan budaya disiplin secara konsisten akan membentuk siswa yang bertanggung jawab dan mampu mengelola dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian oleh Mulyasa (2018) menegaskan bahwa budaya disiplin yang dikembangkan secara kolektif berpengaruh langsung terhadap pembentukan karakter peserta didik.

Penerapan budaya sekolah yang positif akan lebih efektif apabila didukung oleh keteladanan seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, staf, hingga peserta didik. Budaya sekolah yang hidup dan konsisten menjadikan

nilai-nilai Pancasila tidak sekadar diajarkan secara normatif, tetapi dialami dan dipraktikkan dalam keseharian siswa. Dengan demikian, sekolah berfungsi sebagai miniatur kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan nilai luhur Pancasila.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah memerlukan pendekatan yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan melalui integrasi pembelajaran formal, nonformal, dan kultural. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dirancang secara tepat, pembelajaran berbasis proyek, diskusi kritis, upacara bendera yang bermakna, kegiatan ekstrakurikuler, peringatan hari besar nasional, kegiatan sosial, keteladanan guru dan staf sekolah, serta penerapan budaya sekolah yang positif terbukti saling melengkapi dalam membentuk karakter peserta didik yang beriman, berperikemanusiaan, cinta tanah air, demokratis, dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, disarankan agar satuan pendidikan dan pemangku kebijakan memperkuat sinergi antar program tersebut dengan memberikan dukungan kebijakan, sarana prasarana, dan peningkatan kompetensi pendidik, sehingga nilai-nilai Pancasila tidak hanya diajarkan secara normatif, tetapi benar-benar diinternalisasikan dan diwujudkan dalam sikap serta perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

PUSTAKA ACUAN

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hidayat, R., & Widodo, S. T. (2018). Peran kegiatan upacara bendera dalam menumbuhkan sikap nasionalisme siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(1), 45–56. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/21576>

- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kemendikbud. (2017). *Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan pengembangan projek penguatan profil pelajar Pancasila*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. *Improving Schools*, 19(3), 267–277. <https://doi.org/10.1177/1365480216659733>
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Komalasari, K. (2017). *Pendidikan karakter: Konsep dan aplikasi living values education*. Bandung: Refika Aditama.
- Komalasari, K. (2017). *Pendidikan karakter: Konsep dan aplikasi living values education*. Bandung: Refika Aditama.
- Lickona, T. (2013). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mulyasa, E. (2018). *Manajemen pendidikan karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurhadi, A., & Hidayat, N. (2020). Penguatan nilai toleransi melalui kegiatan berbasis budaya di sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(1), 55–67. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/30345>
- Nurizka, R., & Rahim, A. (2020). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter siswa melalui budaya sekolah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1)
- Nurizka, R., & Rahim, A. (2020). Pendidikan Pancasila sebagai upaya pembentukan karakter bangsa. *Jurnal Civic Hukum*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i1.10454>
- Nurizka, R., & Rahim, A. (2020). Pendidikan Pancasila sebagai upaya pembentukan karakter bangsa. *Jurnal Civic Hukum*, 5(1), 1–10. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/10454>
- Sari, D. P., & Setiawan, R. (2021). Pembentukan karakter peduli sosial melalui kegiatan bakti sosial di sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(2), 198–210. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/43215>
- Sari, D. P., & Wahyudi, A. (2020). Pembiasaan budaya 5S dalam membentuk karakter sopan santun siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 183–194. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/32766>
- Sari, D. R., Sumarmi, & Astina, I. K. (2016). Pengaruh model project based learning terhadap kemampuan berpikir kritis dan sikap sosial siswa. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 1(4), 608–614. <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view/6226>
- Setyowati, R., & Winarno. (2020). Penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PPKn berbasis isu kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 134–145. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/13544>
- Somantri, M. N. (2011). *Menggagas pembaruan pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryani, E., & Aman. (2018). Peran kegiatan Pramuka dalam membentuk karakter disiplin dan nasionalisme siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(2), 171–182. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/21602>
- Sutono, A. (2021). Pendidikan Pancasila dan penguatan karakter kebangsaan di sekolah. *Jurnal Civics: Media*

- Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 123–134.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/40709>
- Suyanto, S., & Widodo, A. (2020). Pendidikan karakter demokratis melalui pembelajaran di kelas. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 1–12.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/32228>
- Suyato, & Widodo, S. T. (2016). Pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan karakter bangsa melalui pembelajaran berbasis diskusi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 6(1), 25–38.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/10714>
- Wibowo, A. (2016). *Pendidikan karakter: Strategi membangun karakter bangsa berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widiastuti, N., & Pranowo, S. (2019). Peran kegiatan donor darah dalam membangun kesadaran sosial peserta didik. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(1), 45–56.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/25984>
- Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno. (2018). Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan di sekolah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), 129–140.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/13805>
- Wuryandani, W., & Prasetyo, Z. K. (2019). Keteladanan guru dalam pembentukan karakter disiplin siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(1), 1–14.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/23888>
- Wuryandani, W., Faturrohman, F., Senen, A., & Haryani, H. (2018). Pendidikan karakter melalui kegiatan kerja bakti di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(1), 33–45.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/17721>
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.